



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RUTAN KELAS I BANDUNG TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT karena atas nikmat, rahmat, dan maghfirah-Nya laporan Ini dapat diselksaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad ShalalLahu Alaihi Wasalam, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan para pengikutnya hingga akhir jaman, Aamiin.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2021 dapat disusun, hal ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas target kinerja dan penggunaan anggaran Tahun 2021. Laporan kinerja ini juga merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung.

Laporan ini menggambarkan terkait keadaan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja kedepan. Semoga laporan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2021 ini dapat dipahami dengan baik, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala,
Rumah Tahanan Negara
Kelas I Bandung



Riko Stiven

N.P. 19870516 200604 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABLE	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	10
BAB III	12
AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran	14
C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja	17
D. Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV.....	35
PENUTUP.....	35
A. KESIMPULAN	35
B. SARAN	38

DAFTAR TABLE

Tabel 1	:	Diagram Struktur Organisasi
Tabel 2	:	Pegawai Rutan Kelas 1 Bandung
Tabel 3	:	Data Penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

DAFTAR GAMBAR

1. Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan;
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya dibidang Pemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, maka Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung wajib membuat pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk dokumen LAKIP. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa kita sebut SAKIP merupakan upaya dalam membangun pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintahan yang bersih (*clean governance*), dan terpercaya adalah tujuan dari reformasi birokrasi yang telah berjalan lebih dari 2 (dua) dasawarsa, hal ini sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme. LAKIP merupakan instrument yang digunakan oleh instansi pemerintah, baik kementerian atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta memberikan gambaran tentang berbagai hal yang telah dilaksanakan dan hambatan yang dihadapi.

LAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan diantaranya, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu serta evaluasi kinerja. LAKIP dibuat sebagai implementasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk melakukan pelaporan pengukuran pencapaian kinerja pada Tahun 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung. Pada pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

Berikut adalah kajian dan tinjauan terhadap dasar hukum yang mengatur mengenai penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP):

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
11. Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM RI;
12. Keputusan Kepala LAN No: 239/IX/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-05.OT.01.10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri

- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 17. Permenpan RB No. 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 18. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dibangun pada tahun 1927, sebelum digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terlebih dahulu dipinjam dan digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Militer untuk Tahanan politik dan militer dari tahun 1960 sampai tahun 1980, kemudian dikosongkan. Rutan Kelas I Bandung selanjutnya dipergunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banceuy, baru pada tanggal 01 Juli 1990 resmi digunakan untuk Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung. Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung terletak di Jalan Jakarta No. 29 Kelurahan Kebonwaru, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Tekstil Bandung, sebelah Barat berbatasan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, dan sebelah Selatan dengan Jalan Jakarta Bandung.

➤ Tugas

Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

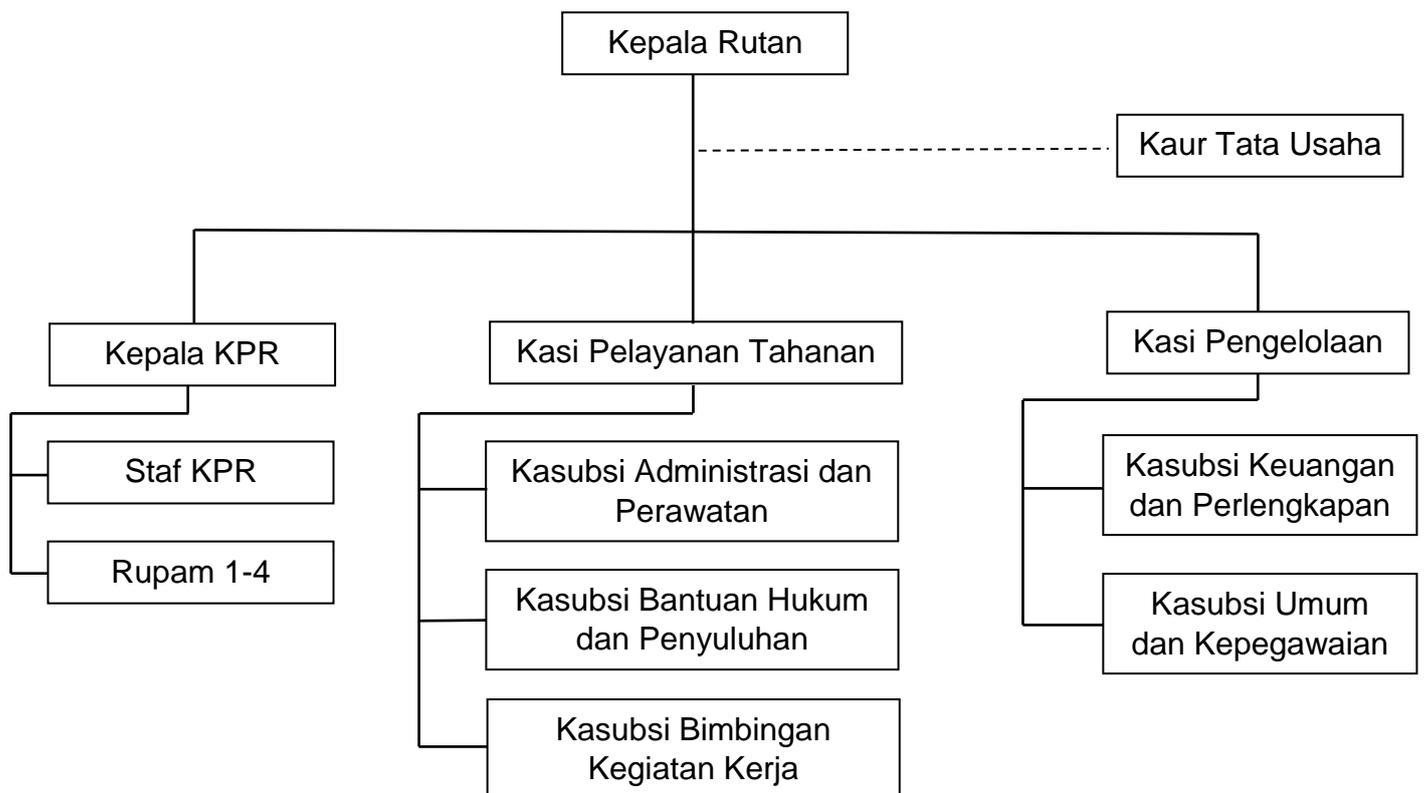
➤ Fungsi

Melaksanakan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib, pengelolaan dan tata usaha Rumah Tahanan Negara.

➤ Kedudukan

Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang pelayanan Tahanan dalam rangka untuk kepentingan penyidikan penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan. Kedudukannya di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, serta bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

➤ Struktur Organisasi



Tabel 1. Diagram Struktur Organisasi

➤ Profil Pejabat Struktural

1. Nama : RIKO STIVEN, A.Md.I.P., S.A.P., M.Si.
NIP : 19870516 200604 1 001
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung
2. Nama : DIAZ ARTHUR ARMANDO, Amd.IP., S.H.
NIP : 19900707 200901 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan
3. Nama : IRFAN RIZKY PRASETYAWAN, A.Md.I.P., S.H.
NIP : 19880305 200901 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Tahanan
4. Nama : MUHAMMAD DIHARJA, S.Sos.
NIP : 19860724 200703 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan
5. Nama : SARINAH, S.E.
NIP : 19640727 198503 2 001
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Urusan Tata Usaha
6. Nama : MUH. ARFAN BAKHTIAR, A.Md.I.P., S.H.
NIP : 199111172010121001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan
7. Nama : MARCHILES, A.Md.I.P., S.H. M.H.
NIP : 19900624 200912 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
8. Nama : WAHYUDDIN RANI, A.Md.I.P., S.H.
NIP : 199005112009011 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Bimbingan Kegiatan Kerja
9. Nama : INDRA GANJAR NUGRAHA, S.H., M.H.
NIP : 19850219 200312 1 002
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan
10. Nama : Drs. DENI DASMANA, M.A.P.
NIP : 19670103 199603 1 002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Umum dan Kepegawaian

➤ Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

No	Pendidikan	Golongan			
		IV	III	II	I
1	S2	9	2	-	-
2	S1	-	58	-	-
3	D3	-	4	-	-
4	SMA	-	21	77	-
5	SMP	-	-	-	-
6	SD	-	-	1	-

Tabel 2. Pegawai Rutan Kelas 1 Bandung

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai ketentuan perundang-undangan, menyusun rencana strategis (renstra) digunakan sebagai rencana lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan melaksanakan misi dengan tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan dan indikator pengukurnya.

➤ Visi

Menjadi Penyelenggara Pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM.

➤ Misi

Melaksanakan perawatan Tahanan, Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia melalui proses pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengayoman.

➤ Nilai dasar organisasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai kami "PASTI":

1. Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,

yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

➤ Tujuan

1. Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab; dan
2. Memberi jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

➤ Sasaran

1. Perawatan dan Pembinaan

- a. Kualitas Ketakwaan Kepada Tuhan YME;
- b. Kualitas Intelektual;
- c. Kualitas sikap dan perilaku;
- d. Kualitas profesionalisme dan keterampilan; dan
- e. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

2. Pelaksanaan

- a. Isi lebih rendah dari kapasitas;
- b. Menurunkan angka pelarian dan gangguan kamtib;
- c. Meningkatkan secara bertahap jumlah Napi yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- d. Semakin menurunnya angka residivis;
- e. Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase yang ada di masyarakat;
- f. Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya;
- g. Rutan dalam keadaan bersih dan terpelihara;
- h. Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara.

➤ Peta strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sasaran strategi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang tertuang dalam sebuah gambar dan diagram ini dijadikan landasan arah kebijakan yang Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya serta kegiatan-kegiatan yang menunjang terwujudnya visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

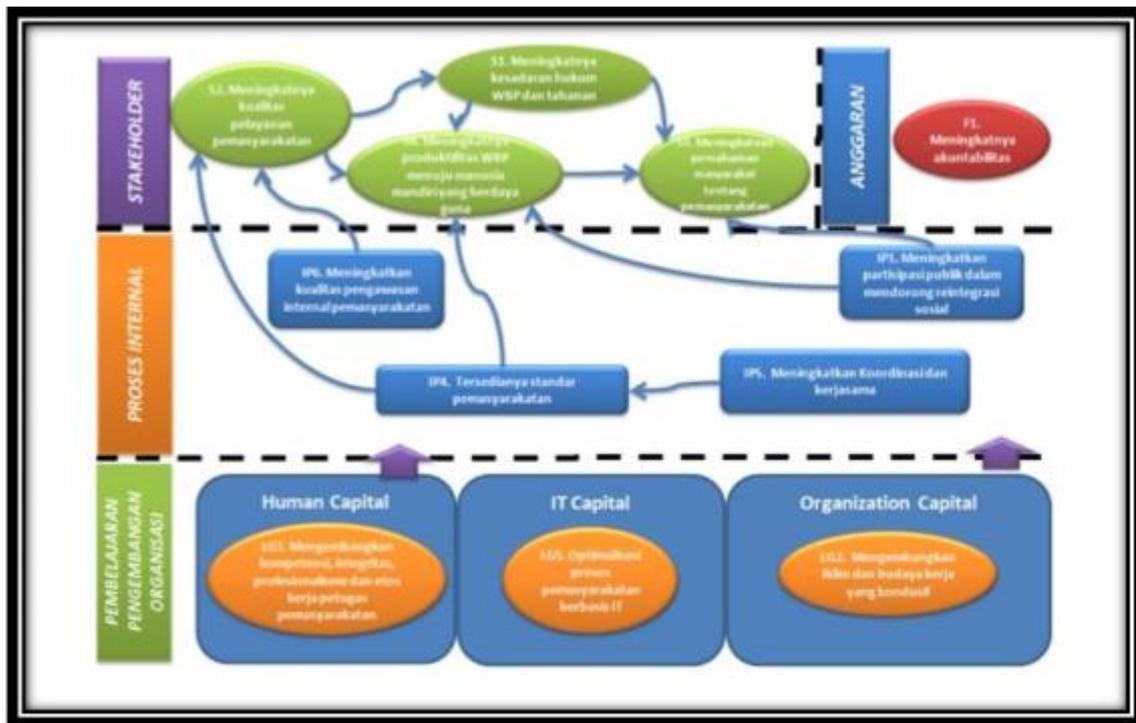


Diagram Peta Strategis Ditektorat Jenderal Pemasyarakatan

Dalam diagram diatas menunjukkan bahawa menegakan hukum dan hak asasi manusia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatah menjadi nomor utama, yang kedua adalah pengelolaan Pemasyarakatan yang menerapkan standar Pemasyarakatan berbasis IT, Ketiga meningkatkan Pastisipasi masyarakat untuk terlibat, mendukung dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemasyarakatan dan mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan budaya kerja petugas yang bersih dan bermartabat,

➤ Arah Kebijakan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

instansi pemerintah. Kebijakan yang ditempuh Rutan Kelas 1 Bandung sesuai dengan arah kebijakan dari Dirjen PAS yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Setelah Rutan Kelas I Bandung mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara maka Rutan Kelas I Bandung sesuai arahan dari Dirjen Pemasarakatan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan meningkatkan seluruh komponen penunjang dalam meraih predikat WBBM;
- b. Penjamin standar pelayanan masyarakat dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan masyarakat;
- c. Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
- d. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, sop layanan, dan standar layanan;
- e. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

➤ Perintah Harian

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Berikut akan diuraikan target kinerja tahun 2021 sesuai dengan indikator setiap sasaran serta kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 BANDUNG
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riko Stiven, Amd.IP., S.A.P., M.Si.
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Syafar Puji Rochmadi, Bc.IP., S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 5 Januari 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Rumah Tahanan Negara
Kantor Wilayah Kementerian Kelas 1 Bandung
Hukum dan HAM Jawa Barat

Syafar Puji Rochmadi, Bc.IP., S.H., M.H. Riko Stiven, Amd.IP., S.A.P., M.Si.
NIP. 19630709 198703 1 00 1 NIP. 19670516 200604 1 00 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 BANDUNG
DENGAN KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum Persentase Tahanan Yang Mengikuti Fasilitas Bantuan Hukum	70% 70% 70%
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (prevensif) secara berkualitas Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat terangani Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV/AIDS (diikuti jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	71% 92% 95% 60% 75% 75% 60% 23%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75% 60% 75%

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.358.300.000,00
Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 13.856.487.000,00
Total	Rp. 21.214.787.000,00

Bandung, 5 Januari 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kepala Rumah Tahanan Negara
Kantor Wilayah Kementerian Kelas 1 Bandung
Hukum dan HAM Jawa Barat

Syafar Puji Rochmadi, Bc.IP., S.H., M.H. Riko Stiven, Amd.IP., S.A.P., M.Si.
NIP. 19630709 198703 1 00 1 NIP. 19670516 200604 1 00 1

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan, kriteria keberhasilan ini berupa tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2021, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dengan perincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	100%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70,2%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	71%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	100%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	23%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100	100	100%
	Nilai SMART	100	100	100%

B. Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran ini diisi dengan pagu alokasi Unit Pelaksana Teknis yang terdapat dalam RKA-KL pada tahun anggaran. Menjelaskan anggaran pada tiap akun yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA TINGKAT SATUAN KERJA PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: 013	Kementerian Hukum dan HAM RI
Eselon I	: 05	Ditjen Pemasarakatan
Wilayah/Provinsi	: 0200	BA(013) ES1(05) Jawa Barat
Satuan Kerja	: 526801	Rumah Tahanan Negara Bandung
Jenis Satuan Kerja	: KD	Kantor Daerah

**LAPORAN REALISASI
RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG**

Bulan : Desember

Kode	Uraian [register - Beban - jnsban- Cr Tarik - KFPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	9.786.550.000	9.781.721.995	4.828.005
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	9.786.550.000	9.781.721.995	4.828.005
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9.729.550.000	9.727.874.150	1.675.850
5252.BDC.001	Layanan Tahanan	124.150.000	122.974.369	1.175.631
051	Administrasi Tahanan	67.800.000	67.341.875	458.125
A	Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	16.000.000	17.848.500	151.500
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	17.850.000	17.848.500	1.500
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
B	Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	24.600.000	24.448.000	152.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	24.450.000	24.448.000	2.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
C	Penyuluhan Hukum	12.600.000	12.599.975	25
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	12.600.000	12.599.975	25
D	Rapat Koordinasi	12.600.000	12.445.400	154.600
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	12.450.000	12.445.400	4.600
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
052	Pembimbingan Kegiatan Tahanan	56.350.000	55.632.494	717.506
A	Kegiatan Keagamaan	32.250.000	31.849.000	401.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	24.800.000	24.799.000	1.000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.050.000	7.050.000	0
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Jasa Profesi	250.000	0	250.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
B	Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	17.450.000	17.298.494	151.506
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	12.300.000	12.298.494	1.506
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.000.000	5.000.000	0
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
C	Kegiatan Kesenian dan Olahraga	6.650.000	6.485.000	165.000
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.500.000	6.485.000	15.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	9.605.400.000	9.604.899.781	500.219
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	8.808.450.000	8.808.438.788	11.212
A	Pengadaan Bahan Makanan Waruga Binaan Pemasyarakatan	8.808.450.000	8.808.438.788	11.212
521112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengadaan Bahan Makanan	8.808.450.000	8.808.438.788	11.212
051	Kebutuhan Dasar	540.000.000	539.822.953	177.047
A	Kebutuhan Sandang	184.000.000	183.995.200	4.800
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	184.000.000	183.995.200	4.800
B	Pemenuhan Sarana Makan Minum	189.000.000	188.974.474	25.526
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	189.000.000	188.974.474	25.526
C	Pemenuhan Perlengkapan mandi	69.000.000	68.991.261	8.739
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	69.000.000	68.991.261	8.739
D	Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	4.500.000	4.500.000	0
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.500.000	4.500.000	0
E	Ekstra Vooceding	93.000.000	92.862.000	138.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	93.000.000	92.862.000	138.000
F	Pemulasaran	500.000	500.000	0
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500.000	500.000	0
052	Layanan Kesehatan	256.950.000	256.638.038	311.962
A	Perawatan Kesehatan Tahanan/Narapidana	27.450.000	27.144.578	305.422
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	19.050.000	19.045.500	4.500
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8.100.000	8.099.078	922
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Jasa Profesi	300.000	0	300.000
B	Perlengkapan Medis Poliklinik	165.600.000	165.597.500	2.500
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	165.600.000	165.597.500	2.500
C	Penanganan dan Pencegahan Covid-19	63.900.000	63.895.960	4.040
521841	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan - Penanganan	63.900.000	63.895.960	4.040
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	57.000.000	53.847.843	3.152.157
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	57.000.000	53.847.843	3.152.157
051	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	26.400.000	23.851.637	2.548.363
A	Penegakan Keamanan dan Ketertiban	26.400.000	23.851.637	2.548.363
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	14.400.000	14.399.453	547
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	12.000.000	9.452.182	2.547.818
052	Pengawasan	30.600.000	29.996.208	603.792
A	Pengawasan Narapidana	300.000	0	300.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
B	Perpindahan (Mutasi) Narapidana	30.300.000	29.996.208	303.792

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana - Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -Jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	30.000.000	29.996.200	3.792
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
WA	Program Dukungan Manajemen	13.028.417.000	13.999.029.864	28.787.136
0231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	13.028.417.000	13.999.029.864	28.787.136
0231.EAA	Layanan Perkantoran	13.533.417.000	13.510.199.585	23.217.415
0231.EAA.994	Layanan Perkantoran	13.533.417.000	13.510.199.585	23.217.415
001	Gaji dan Tunjangan	11.196.686.000	11.189.656.224	7.029.776
A	<u>Pembayaran gaji dan tunjangan</u>	11.144.967.000	11.138.560.224	6.426.776
511111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Gaji Pokok PNS	7.527.765.000	7.527.456.100	308.900
511119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pembulatan Gaji PNS	151.000	116.296	34.704
511121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	504.225.000	504.085.036	139.964
511122	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Anak PNS	149.677.000	149.662.819	14.181
511123	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Struktural PNS	66.580.000	66.460.000	120.000
511124	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Fungsional PNS	617.200.000	617.155.000	45.000
511125	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. PPh PNS	11.395.000	11.389.213	5.787
511126	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunj. Beras PNS	455.378.000	454.652.760	725.240
511129	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Uang Makan PNS	1.800.016.000	1.794.953.000	5.033.000
511151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Tunjangan Umum PNS	12.600.000	12.600.000	0
B	<u>Uang Lembur</u>	51.699.000	51.096.000	603.000
512211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Uang Lembur	51.699.000	51.096.000	603.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.336.731.000	2.320.543.361	16.187.639
A	<u>Kesehatan Pegawai</u>	4.350.000	4.350.000	0
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.350.000	4.350.000	0
B	<u>Pakaian Dinas</u>	149.600.000	149.132.500	467.500
521119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	149.600.000	149.132.500	467.500
C	<u>Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman</u>	632.530.000	632.529.471	529
523111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	632.530.000	632.529.471	529
D	<u>Pemeliharaan Peralatan Perkantoran</u>	60.126.000	60.123.127	2.873
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60.126.000	60.123.127	2.873
E	<u>Pemeliharaan Kendaraan</u>	59.000.000	58.992.026	7.974
521119	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Operasional Lainnya	10.000.000	9.996.471	3.529
523121	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.000.000	48.995.555	4.445
F	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>	696.200.000	684.456.310	13.741.690
521111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Keperluan Perkantoran	30.000.000	17.939.990	12.060.010
522111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Langganan Listrik	635.000.000	634.516.600	483.400
522112	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Langganan Telepon	1.200.000	1.178.720	21.280
522113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Langganan Air	32.000.000	30.823.000	1.177.000
G	<u>Jasa Pos</u>	4.500.000	4.495.500	4.500
521114	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.500.000	4.495.500	4.500
H	<u>Keperluan Perkantoran</u>	249.000.000	248.993.389	4.611
521111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Keperluan Perkantoran	136.000.000	135.998.932	1.068
521811	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	113.000.000	112.996.457	3.543
I	<u>Konsultasi dan Koordinasi</u>	150.000	0	150.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
J	<u>Jamuan Tamu</u>	7.200.000	7.195.352	4.648
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	7.200.000	7.195.352	4.648
K	<u>Honor Operasional Satuan Kerja</u>	130.200.000	128.400.000	1.800.000
521115	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	130.200.000	128.400.000	1.800.000
L	<u>Penambah Daya Tahan Tubuh</u>	136.875.000	136.875.000	0
521113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	136.875.000	136.875.000	0
M	<u>Penanganan dan Pencegahan Covid-19</u>	5.000.000	4.996.686	3.314
521841	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Persediaan - Penanganan	5.000.000	4.996.686	3.314
0231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	13.000.000	12.398.000	602.000
0231.EAB.001	Program dan Anggaran UPT	3.900.000	3.600.000	300.000
051	Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	3.900.000	3.600.000	300.000
A	<u>Penyusunan RKAKL</u>	3.900.000	3.600.000	300.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	3.600.000	3.600.000	0
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
0231.EAB.002	Manajemen keuangan UPT	7.100.000	6.798.000	302.000
051	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	7.100.000	6.798.000	302.000
A	<u>Pengelola Sistem Akuntansi</u>	7.100.000	6.798.000	302.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	6.800.000	6.798.000	2.000
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
0231.EAC	Layanan Umum	25.460.000	24.858.871	601.129
0231.EAC.001	Manajemen BMN UPT	25.460.000	24.858.871	601.129
051	Urusan Umum	8.300.000	7.998.871	301.129
A	<u>Urusan Umum</u>	8.300.000	7.998.871	301.129
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	8.000.000	7.998.871	1.129

= Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]

Kode	Uraian [register - Beban -Jnsban- Cr Tarik - KFPN - Lokasi - Kabkota]	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
052	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	4.200.000	3.900.000	300.000
A	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	4.200.000	3.900.000	300.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	3.900.000	3.900.000	0
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
053	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	12.960.000	12.960.000	0
A	Administrasi Pengadaan Barang	12.960.000	12.960.000	0
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	10.680.000	10.680.000	0
521213	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Honor Output Kegiatan	2.280.000	2.280.000	0
0231.EAF	Layanan SDM	37.825.000	34.225.000	3.600.000
0231.EAF.001	Manajemen kepegawaian UPT	37.825.000	34.225.000	3.600.000
052	Pembinaan Kepegawaian	37.825.000	34.225.000	3.600.000
A	Pembinaan Fisik dan Mental dan Disiplin (FMD)	37.825.000	34.225.000	3.600.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	2.805.000	2.805.000	0
521219	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Barang Non Operasional Lainnya	29.920.000	29.920.000	0
522151	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Jasa Profesi	5.100.000	1.500.000	3.600.000
0231.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7.100.000	6.798.408	301.592
0231.EAH.001	Reformasi Birokrasi UPT	7.100.000	6.798.408	301.592
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas	7.100.000	6.798.408	301.592
A	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	7.100.000	6.798.408	301.592
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	6.800.000	6.798.408	1.592
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
0231.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	7.200.000	7.035.000	165.000
0231.EAI.001	Hubungan masyarakat UPT	7.200.000	7.035.000	165.000
051	Penyediaan informasi publik	1.100.000	1.085.000	15.000
A	Penyediaan Informasi Publik	1.100.000	1.085.000	15.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	1.100.000	1.085.000	15.000
052	Kerjasama	6.100.000	5.950.000	150.000
A	Kerjasama	6.100.000	5.950.000	150.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	5.950.000	5.950.000	0
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000
0231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	4.415.000	4.115.000	300.000
0231.EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	4.415.000	4.115.000	300.000
051	Penyusunan Laporan Kinerja	4.415.000	4.115.000	300.000
A	Penyusunan Laporan Kinerja	4.415.000	4.115.000	300.000
521211	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Bahan	4.115.000	4.115.000	0
524111	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000	0	150.000
524113	[00000000-A-0-0-022-02-51] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000	0	150.000

C. Evaluasi dan Analisis Realisasi Kinerja

Pengukuran kinerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Adapun hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran kami sampaikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1

Presentase Pelayanan Tahanan

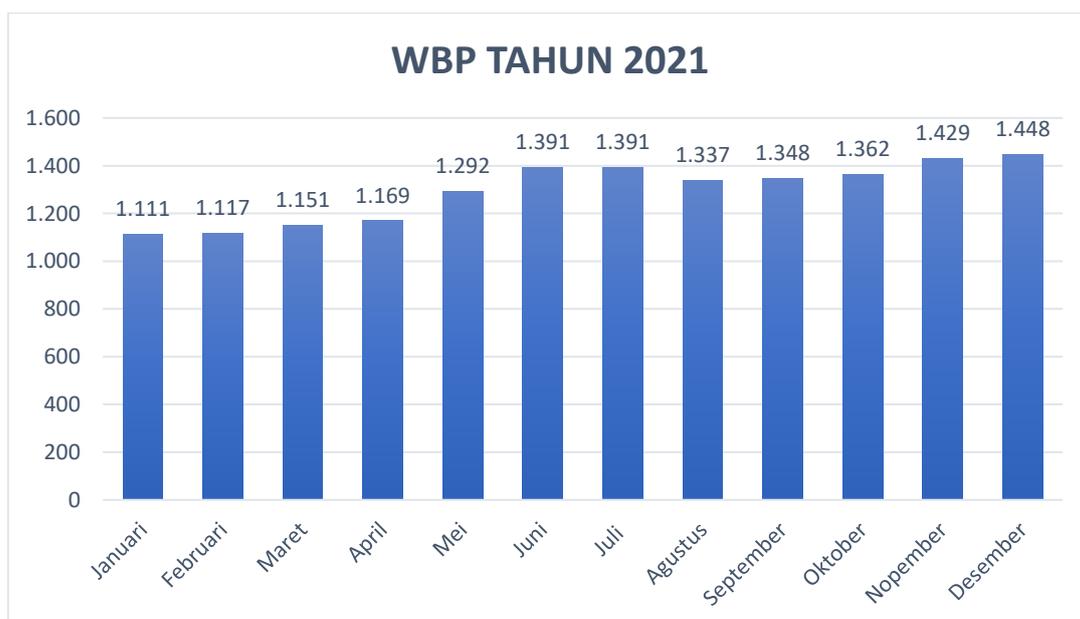
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	100%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70,2%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	100%	100%

Tabel 6. Indikator 1 Realisasi Kinerja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan ini memiliki tiga indikator kinerja, untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut kita harus menghitung presentase Kualitas Pelayanan Tahanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian indikator sebagai berikut:

- Persentase tahanan Overstaying;
- Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum; dan
- Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum.

Berdasarkan data yang ada di Sistem database pemasyarakatan (SDP) jumlah WBP di Rutan Kelas I Bandung dapat digambarkan melalui grafik berikut :



- a. Capaian Indikator Kinerja: Persentase Tahanan Overstaying atau mengalami kelebihan masa tahanan selama tahun 2021 sesuai dengan data yang diambil dari SDP adalah sebanyak 0 WBP atau dengan kata lain 100% tidak ada tahanan Overstay di Rutan Kelas I Bandung sepanjang tahun 2021.

Adapun Indikator Persentase Tahanan Overstaying dapat diperkuat dengan data kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dimana pada tahun 2021 Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dengan rincian sebagai berikut :

BULAN	USULAN		DISETUJUI		JUMLAH
	PB	CB	PB	CB	
Januari	21	9	21	9	30
Februari	32	42	32	42	74
Maret	16	35	16	35	51
April	13	25	13	25	38
Mei	15	20	15	20	35
Juni	35	35	35	35	70
Juli	35	35	35	35	70
Agustus	26	33	26	33	59
September	21	18	21	18	39
Oktober	45	49	45	49	94
November	45	49	45	49	94
Desember	17	22	17	22	39
TOTAL	321	372	321	372	693

Selain data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan Mutasi Narapidana/Tahanan selama Tahun 2021 untuk memenuhi indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying sesuai standar, adapun data Mutasi Narapidana/Tahanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
Januari	LAPAS KELAS II B TASIKMALAYA	1
Februari	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Maret	LAPAS KELAS I SUKAMISKIN BANDUNG	5
April	LAPAS KELAS II B CIANJUR	1

BULAN	TUJUAN MUTASI	JUMLAH
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
Mei	LAPAS KELAS I CIPINANG	1
Juni	NIHIL	
Juli	NIHIL	
Agustus	LAPAS KELAS I SUKAMISIN	15
	LAPAS KELAS II B BANJAR	25
	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	25
September	LAPAS KELAS II A BANCEUY	25
	LAPAS KHUSUS KELAS II A KARANG ANYAR	2
Oktober	LAPAS KELAS II A SUBANG	35
November	LAPAS KELAS I NUSAKAMBANGAN	1
	LAPAS KELAS II A BANCEUY	10
Desember	LAPAS KELAS II A NARKOTIKA BANDUNG	30
	LAPAS KELAS II A SUBANG	1
TOTAL		252

Melalui ketiga sumber data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan Overstaying mendapatkan nilai sebesar 100%.

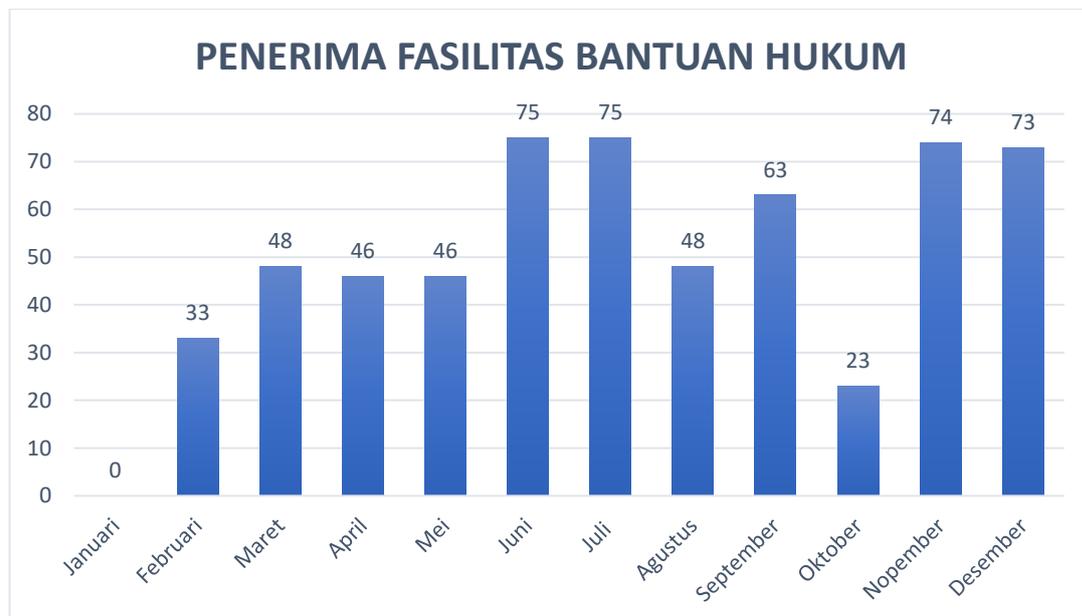
- b. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

BULAN	JUMLAH WBP	PESERTA PENYULUHAN	(%)
Januari	1.111	712	64,1
Februari	1.117	862	77,2
Maret	1.151	836	72,6
April	1.169	897	76,7
Mei	1.292	928	71,8
Juni	1.391	1.031	74,1
Juli	1.391	922	66,3
Agustus	1.337	843	63,1
September	1.348	966	71,7
Oktober	1.362	921	67,6

BULAN	JUMLAH WBP	PESERTA PENYULUHAN	(%)
Nopember	1.429	963	67,4
Desember	1.448	1.029	71,1
TOTAL			70,2

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum adalah 70,2% dari total WBP yang ada di Rutan Kelas I Bandung, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

- c. Capaian Indikator Kinerja: Persentase tahanan yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :



Grafik diatas menyampaikan bahwa seluruh Narapidana/Tahanan yang membutuhkan Fasilitas Bantuan Hukum telah mendapatkan layanan yang sesuai dengan standar, dengan demikian ketercapaian indikator kinerja Persentase tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum mendapatkan nilai sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	71%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	100%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	23%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari sasaran kegiatan tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

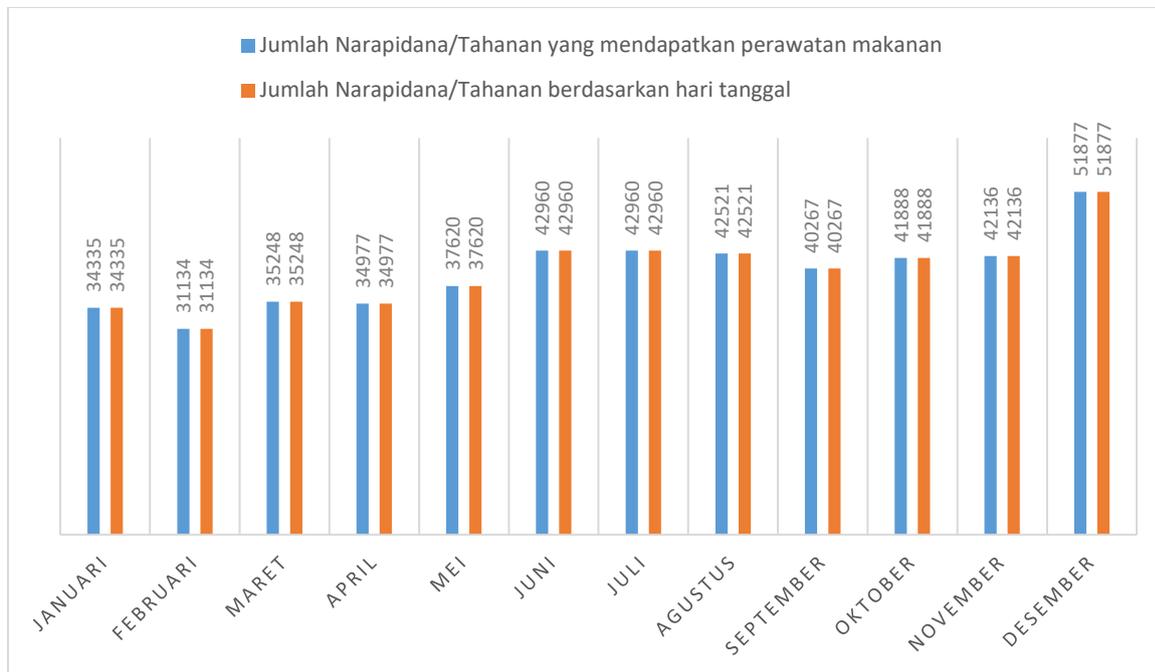
Mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar;
- b. Persentase tahanan/narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi;

c. Persentase tahanan / narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis;

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

a. Persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar.



Berdasarkan data di atas, jumlah total narapidana dan tahanan selama tahun 2021 berdasarkan hari tanggal adalah 443.588 orang dan jumlah narapidana dan tahanan yang mendapatkan makanan sebanyak 443.588 orang. Dengan data tersebut Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan pemberian makan kepada tahanan / narapidana selama Tahun 2021 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase tahanan / narapidana yang mendapatkan makanan sesuai standar sebesar 100%.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang mendapatkan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi.

Jenis Perlengkapan	volume	Jumlah Pemenuhan	(%)	Keterangan
Pakaian narapidana/ tahanan	920x4 stel	3.680	100 %	Volume barang sesuai dengan DIPA TA 2021
Perlengkapan Makan/Minum	920	920	100 %	
Perlengkapan Mandi	920	920	100 %	
TOTAL PEMENUHAN			100 %	

Berdasarkan data tersebut diatas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi selama Tahun 2021 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sandang, perlengkapan makan dan minum dan perlengkapan mandi sebesar 100 %.

- c. Capaian Sub Indikator : Persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis.

Jenis penyakit yang dialami WBP selama tahun 2021

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
1	Abses	267	267
2	Anemia	67	67
3	Asthma Bronciale	69	69
4	Candidiasis	30	30
5	Caries Dentis	164	164
6	Cephalgia	85	85
7	Common Cold	80	80
8	Conjungtivitis	25	25
9	Cought	24	24
10	DKA	318	318
11	DM	23	23
12	Dysmenorhea	17	17
13	Dyspepsia	170	170
14	Gastritis	65	65
15	Gastro Enteritis	263	263

No	Jenis Penyakit	Jumlah Penyakit yang dialami	Jumlah Penyakit yang di tangani
16	Ginggivitis	31	31
17	Haemorhoid	22	22
18	Hematemesis	3	3
19	Hepes Zooster	18	18
20	Hernia	5	5
21	Hordeolum	9	9
22	Hipertensi	427	427
23	Insect Bite	0	0
24	ISPA	653	653
25	ISK (infeksi saluran kemih)	10	10
26	Katarak OD	3	3
27	Konstipasi	45	45
28	Kolik Abdomen	6	6
29	Lypoma	3	3
30	Myalgia	156	156
31	Malaise	8	8
32	Neuropati	0	0
33	OA	24	24
34	OE	15	15
35	OMA	10	10
36	Obs Febris	143	143
37	Osteomyelitis	1	1
38	Pharingitis	375	375
39	Post Trauma	6	6
40	Scabies	281	281
41	Stomatitis	29	29
42	Susp BPH	1	1
43	Susp HNP	5	5
44	Susp OA	16	16
45	Susp TB	25	25
46	TB Paru	19	19
47	Tinea	1	1
48	Thypoid	2	2
49	Tonsilitis	29	29
50	Tinitus	8	8
51	Urtikaria	40	40
52	Varicela	0	0
53	Vertigo	9	9
54	Vulnus Excoriasi	3	3
55	Vulnus Laceratum	1	1
TOTAL		4.109	4.109

Jenis perawatan WBP

Bulan	Rawat Inap Dalam Rutan	Rawat Inap Luar Rutan	Rawat Jalan
Januari	3	0	369
Februari	3	2	375
Maret	1	0	310
April	0	1	321
Mei	0	0	373
Juni	0	1	337
Juli	3	0	350
Agustus	2	2	256
September	0	0	429
Oktober	0	0	244
November	0	1	405
Desember	2	0	342
TOTAL	14	7	

Berdasarkan data tersebut di atas, Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan penanganan medis bagi tahanan / narapidana yang sakit selama Tahun 2021 untuk memenuhi indikator kinerja layanan perawatan tahanan / narapidana sesuai standar, maka capaian indikator persentase tahanan dan narapidana yang sakit dan mendapatkan penanganan medis adalah sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 3

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/ Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai dengan

standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar;
- b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

- a. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar.

Untuk mencegah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Rutan merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai. Langkah- langkah yang dilakukan dalam upaya pencegahan tersebut adalah dengan memeriksa pegawai, tamu juga pengunjung yang masuk ke area portir beserta barang bawaan yang dibawa. Hal ini dilakukan untuk menyaring barang – barang terlarang yang masuk ke dalam. Pada proses ini dilakukan oleh anggota Petugas Pengamanan Pintu Utama yang dibantu piket dari masing – masing seksi. Selain itu dilaksanakan pula pengeledahan terhadap kamar – kamar hunian WBP secara acak dan insidental. Bagi petugas regu pengamanan dan piket, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban juga dapat dilakukan dengan cara kontrol di sekitar blok hunian.

Data Giat Razia dalam Rutan Tahun 2021

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
Januari	4	Instalasi Listrik	Dicatat dan Dimusnahkan
Februari	3	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
Maret	2	- Handphone - Earphone - Charger - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan

Bulan	Jumlah Kegiatan	Hasil Temuan	Tindak Lanjut
April	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Garpu/ Sendok - Gunting - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Mei	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sikim - Kipas	Dicatat dan Dimusnahkan
Juni	5	- Handphone - Earphone - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Juli	4	- Handphone - Earphone - Charger - Botol Kaca - Baterai HP - Besi Tumpul	Dicatat dan Dimusnahkan
Agustus	1	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
September	3	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel –kabel - Charger Handphone - Sendok Stainless	Dicatat dan Dimusnahkan
Oktober	4	- Handphone - Earphone - charger - Kabel –kabel charger	Dicatat dan Dimusnahkan
November	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan
Desember	2	- Handphone - Headshet - Power bank - Kabel -kabel	Dicatat dan Dimusnahkan

Dari data di atas dapat dilihat bahwa selama tahun 2021, kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban selalu dilakukan sebanyak kegiatan dengan melaksanakan penggeledahan baik secara rutin maupun insidental. Dengan

demikian Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar selama Tahun 2021 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar, maka capaian sub indikator persentase pelaksanaan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai standar sebesar 100%

b. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan tindak lanjut gangguan keamanan dan ketertiban yang telah dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menjalani masa pidananya di Rutan Kelas I Bandung.

Data Pelanggaran Tata Tertib Tahun 2021

Jenis Gangguan Kamtib	Jumlah Kasus	Jumlah yang ditindaklanjuti
Pemberontakan	0	0
Penyelundupan/ Penggunaan Narkoba	2	2
Percobaan Pelarian	0	0
Penganiayaan / Kekerasan/ Perkelahian	13	13
Kepemilikan Handphone	24	24
Hutang Piutang	19	19
JUMLAH	58	58

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran tata tertib di Rutan Kelas I Bandung yang dilakukan oleh WBP selama tahun 2021 sebanyak 58 (lima puluh delapan), dan seluruh pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan membuat berita acara dan sanksi kepada pelanggarnya. Dengan demikian gangguan keamanan yang terjadi selalu ditindak dan ditanggulangi sesuai standar. Hal ini menandakan Rutan Kelas I Bandung telah melaksanakan penindakan dan penanggulangan gangguan keamanan sesuai standar selama Tahun 2021 untuk memenuhi indikator kinerja layanan keamanan dan ketertiban sesuai standar,

maka capaian sub indikator persentase gangguan keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya pelayanan Tahanan di dalam Rutan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100	100	100%
	Nilai SMART	100	100	100%

Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung jumlah layanan perkantoran sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Masyarakat berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase layanan perkantoran sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan
- b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan kantor

Adapun capaian dari masing-masing sub indikator tersebut adalah :

a. Capaian Sub Indikator : Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada para pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung.

Dalam pelayanan pembayaran Gaji dan Tunjangan para pegawai Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada diagram berikut :

Data Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan hingga Desember 2021

No	Jenis Pembayaran	Jumlah	
1	Gaji Pokok PNS	Rp.	7.527.456.100
2	Pembulatan Gaji PNS	Rp.	116.296
3	Tunjangan Suami / Isteri	Rp.	504.085.036
4	Tunjangan Anak	Rp.	149.662.819
5	Tunjangan Struktural	Rp.	66.460.000
6	Tunjangan Fungsional	Rp.	617.155.000
7	Tunjangan Beras	Rp.	454.652.760
8	Uang Makan	Rp.	1.794.983.000
9	Tunjangan PPh	Rp.	11.389.213
10	Tunjangan Umum	Rp.	12.600.000

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hingga bulan Desember tahun 2021 ada sembilan jenis pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada pegawai Rutan Kelas I Bandung, dan semua kegiatan tersebut berjalan dengan baik sampai dengan akhir tahun, jadi persentasenya sebesar 100%. Dengan demikian pembayaran gaji dan tunjangan dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

b. Capaian Sub Indikator : Persentase operasional dan pemeliharaan kantor

Pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian Persentase Belanja operasional pemeliharaan kantor pada Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandung selama tahun 2021.

Dalam pelayanan operasional pemeliharaan kantor pada Rutan Kelas I Bandung dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
1	Kesehatan Pegawai	4.350.000	4.350.000	0
2	Pakaian Dinas	149.600.000	149.132.500	467.500
3	Pemeliharaan Gedung	632.530.000	632.529.471	529
4	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	60.126.000	60.123.127	2.873
5	Pemeliharaan Kendaraan	59.000.000	58.992.026	7.974
6	Langganan Daya dan Jasa	898.200.000	884.458.310	13.741.690
7	Keperluan perkantoran	249.000.000	248.995.389	4.611
8	Jasa Pos	4.500.000	4.495.500	4.500
9	Jamuan Tamu	7.200.000	7.195.352	4.648
10	Honor Operasional Satuan Kerja	130.200.000	128.400.000	1.800.000
TOTAL		2.194.706.000	2.178.671.675	16.034.325

Uraian kegiatan pada tabel di atas menerangkan bahwa selama 12 bulan, 10 (sepuluh) kegiatan sudah terealisasi dengan baik atau 99% dari anggaran yang tersedia untuk operasional dan pemeliharaan kantor sudah terserap selama tahun 2021. Dengan demikian sub indikator operasional dan pemeliharaan kantor telah dilakukan setiap bulannya dan memenuhi indikator kinerja layanan perkantoran sesuai standar.

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pada dasarnya pembagian alokasi anggaran pada satuan kerja disesuaikan dengan prioritas pembangunan. Pada tabel dibawah ini disajikan alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran ataupun urusan:

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran	
		Pagu (Rp)	Total realisasi (Rp)
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Tahanan	124.150.000	122.974.369
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	9.605.400.000	9.604.899.781

Nama Kegiatan	Nama Output	Anggaran	
		Pagu (Rp)	Total realisasi (Rp)
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Keamanan dan Ketertiban	57.000.000	53.847.845
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Dukungan Manajemen Satker	95.000.000	89.430.279
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Layanan Perkantoran	13.533.417.000	13.510.199.585
Total		23.414.967.000	23.381.351.859

1. Analisis Rasio Keuangan Kaitannya dengan Pencapaian Kinerja

Dalam suatu sistem pengelolaan keuangan di satuan kerja di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung terkait dengan kegiatan realisasi program perlu ditetapkan standar atau acuan untuk lebih kegiatan yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel. Untuk itu diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Pengukuran kinerja keuangan secara umum mencakup 3 (tiga) bidang yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, meliputi:

- 1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan;
- 2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan kepada masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya biaya tersebut meningkat;

- 3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan, belanja dan proyeksi tahun mendatang.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama tahun 2021 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung pada tahun 2021 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2020-2024. Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	100%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70,2%	100%
	Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	71%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	100%	100%
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	100%	100%
	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	100%	100%
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Persentase tahanan/narapidana/ anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	100%	100%
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	100%	100%
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/ korban penyalahgunaan narkotika	23%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	100%	100%
	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	100%	100%
	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	100%	100%
	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	100%	100%
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Nilai IKPA	100	100	100%
	Nilai SMART	100	100	100%

Dari hasil capaian tersebut, maka Target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung adalah sebesar 79 % dengan realisasi sebesar 100 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung tahun 2021 telah memenuhi target. Capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung berdasarkan hasil penghitungan di atas sudah termasuk kategori Baik

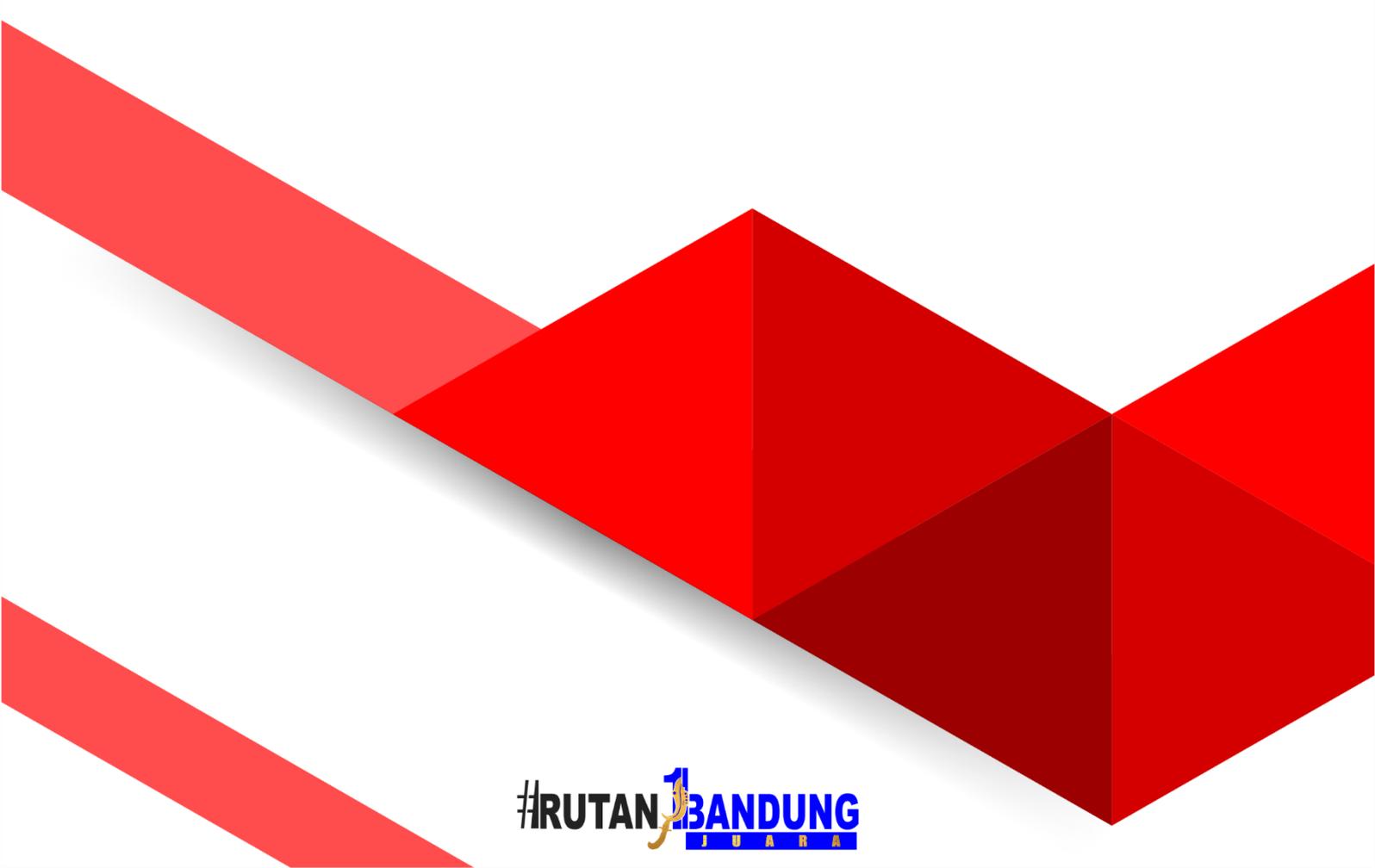
Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung Tahun 2021 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan stakeholder. Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat, secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dan minimnya pemahaman petugas atas budaya pelayanan serta SOP mengenai pelayanan kunjungan yang kurang efektif dan efisien;
2. Tidak adanya pembinaan lanjutan bagi narapidana yang sudah bebas serta hasil pembinaan yang tidak maksimal;
3. Kurangnya tenaga medis pelaksana rehabilitasi serta tidak adanya anggaran untuk program rehabilitasi;
4. Minimnya anggaran sarana dan prasarana pembinaan keterampilan, minimnya kualitas dan kuantitas SDM yang melakukan program pembinaan, serta minimnya minat narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian;
 5. Tidak adanya tenaga infrastruktur tetap, sulitnya pemasaran untuk hasil karya narapidana, serta minimnya anggaran untuk pembinaan keterampilan kerja;
 6. Pelayanan administrasi tergantung dengan internet, kurang pahamnya petugas tentang mekanisme dokumen laporan, dan keterlambatan administrasi dari penegah hukum lainnya;
 7. Belum optimalnya SDP integrasi, terlambatnya litmas dari bapas, serta kurangnya kelengkapan administrasi pengusulan integrasi;
 8. Minimnya ketaatan petugas untuk melaksanakan SOP serta sulitnya mengendalikan peredaran HP dan narkoba;
 9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban serta tidak jeranya narapidana yang diambil tindakan atas pelanggaran; dan
 10. Rendahnya budaya kerja, penguasaan teknologi, minimnya monitoring pelaksanaan tugas layanan internal perkantoran.

B. Saran

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Ditjen Pemasyarakatan dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis pemasyarakatan dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan;
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Bandung dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan teknis pemasyarakatan;
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan pemasyarakatan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.



#RUTAN **1** BANDUNG
JUARA